

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG



RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2022

**DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat dan rahmat-Nya dapat diselesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2022 yang merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan pembangunan koperasi, perindustrian dan perdagangan satu tahun kedepan untuk mencapai misi dan tujuan Dinas dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik (Good Governance), efisien, efektif, bersih dan responsif serta dapat dikontrol oleh semua pihak.

Dalam penyusunan RENJA 2022 secara sistematis dan melembaga ini sudah disesuaikan dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2022, dimana dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang saat ini sedang dilakukan perubahan. RENJA 2022 ini tidak hanya memperhatikan Renstra dan perkembangan serta isu — isu terkini koperasi, perindustrian dan perdagangan baik di daerah maupun nasional, tetapi juga lebih menekankan pada pencapaian target kinerja yang tertuang dalam sasaran strategis dengan mengikuti Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang. Demikian RENJA 2022 Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, Agustus 2022

**KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SAMPANG**



Dr. Hj. Suhartini Kaptiati

NIP. 19641005 199210 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika.....	I-7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-37
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-46
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III-4
3.3. Program dan Kegiatan	III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.....	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi yang sangat cepat terjadi, dan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan maka ditahun 2021 urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan digabung menjadi satu perangkat daerah, yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kab. Sampang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD)
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan anggaran (RKA) Tahun 2022
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2021, yang merupakan pencapaian dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyesuaian hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Adapun bagan Alir tahap Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat daerah adalah sebagai berikut :



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540)
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 27. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2005–2020;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 7 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 29 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3).
 38. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah agar dapat jadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dasar pada tahun ini, yang merupakan salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sampang. Secara rinci maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas.
2. Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dinas.

Tujuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2022
2. Sebagai bahan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Berisikan latar belakang penyusunan Rencana Kerja OPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang, landasan hukum penyusunan dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

Berisikan Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2020, Analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD serta program dan kegiatan tahun 2022 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2022 serta pendanaannya.

Bab V : Penutup

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja di Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal, disebabkan adanya *pandemic covid-19* yang dilanjutkan dengan adanya Refocusing anggaran serta adanya perubahan kondisi yang terjadi dilapangan dari kondisi yang direncanakan semula serta kendala-kendala teknis lainnya yang belum mampu dituntaskan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

Sebelum adanya penggabungan antara DISKUMNAKER dan DISPERDAGPRIN di tahun 2021, di tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp.6.132.506.902,00 (Enam Milyar Seratus Tuga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah), sedangkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp.17.078.781.200,00 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) yang penjabaran dan rinciannya tertuang pada table dibawah ini:

Tabel T-C29
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Kegiatan Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
DISKUMNAKER										
	Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi dan jasa perkantoran								
	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Pemenuhan Jasa Tim Pengelola Keuangan	12	12	12	12	100%			
		Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	12	12	12	12	100%			
		Jumlah surat terkirim	1250	982	1050	750	71%			
		cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	12	12	12	12	100%			
		Jumlah bahan bacaan yang disediakan	730	730	730	730	100%			
		Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman rapat	780	0	684	424	62%			

						Jumlah pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman tamu	50	28	20	10	50%			
						Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan;	30	30	30	30	100%			
						Jumlah Tenaga tukang kebun	2	2	2	2	100%			
						Jumlah tenaga kebersihan;	4	4	4	4	100%			
						Jumlah Tenaga Satpam	6	6	6	6	100%			
					Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jenis Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 tahun	40	40	37	35	95%			
						jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13	13	10	9	90%			
						Jumlah alat kebersihan yang disediakan	24	24	25	19	76%			
						jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8	8	8	7	88%			
						Jumlah jenis barang yang dicetak	12	12	9	8	89%			
						Jumlah penggandaan	50056	50056	28800	22,741	79%			
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah PNS yang mengikuti rapat-rapat, konsultasi, koordinasi dalam lingkup Kabupaten Sampang;	100	100	100	100	100%			
						jumlah PNS yang mengikuti Rakorda luar daerah;;	150	150	80	80	100%			
						Jumlah konsultasi luar daerah	10	10	10	79	790%			

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik														
				Pembangunan/Rehab/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah pemeliharaan gedung kantor;	1	1	1	1	100%									
				Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opearsional	jumlah kendaraan dinas roda 4 yang di servis	4	4	4	4	100%									
				Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah meubeleur kantor yang di service	51	51	35	35	100%									
					jumlah pengadaan lemari arsip / roll o pack	1	0	0	1	0%									
					jumlah pengadaan computer	0	4	2	2	100%									
					jumlah pengadaan notebook	4	4	1	1	100%									
					jumlah pengadaan scanner folio	1	0	1	1	100%									
					jumlah pengadaan mesin penghancur kertas	0	0	2	2	100%									
					jumlah pemeliharaan alat-alat kantor dan inventaris yang di service	65	65	40	40	100%									
					Jumlah Pengadaan AC	0	0	2	2	100%									
					Jumlah Pengadaan Printer	4	4	0	0	0%									
					Jumlah Pengadaan Scaner	0	-	1	1	100%									
					Pengadaan layar proyektor	0	1	2	2	100%									
					Pengadaan megaphone	1	0	1	1	100%									

				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur														
				Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi/Seminar	Jumlah PNS yang mengikuti bimtek	6	6	3	0	0%									
				Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang baik dan tepat waktu														
				Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	1	1	100%									
					Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;	2	2	2	2	100%									
					Jumlah Dokumen penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;	1	1	1	1	100%									
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Penyusunan Daftar Gaji	1	1	1	1	100%									
					Jumlah Dokumen Penyusunan Renja, RKA-SKPD dan DPA SKPD;	3	3	3	3	100%									
				Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah (Pameran)	1	1	1	1	100%									

						1	1	1	1	100%			
					Jumlah Promosi Pelayanan Perangkat Daerah (Pawai Pembangunan)								
				Program Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	a. Persentasi Koperasi yang melaksanakan RAT								
					b. Persentase UM yang berlegalitas								
				Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Mikro	a. Jumlah UM yang dibina kelembagaannya;	350	0	350	0	0%			
					b. Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi	28	52	28	28	100%			
				Pembinaan dan pengawasan koperasi dan Usaha Mikro	a. Jumlah Pendampingan pada Koperasi untuk berkinerja baik;	52	0	52	52	100%			
					b. Jumlah Koperasi yang berkualitas;	20	0	20	0	0%			
					c. Jumlah koperasi yang dinilai kesihatannya	25	0	25	0	0%			
					d. Jumlah Pendataan Usaha Mikro;	400	0	400	400	100%			
					e. Jumlah Peserta Upacara Hari Koperasi.	700	0	700	700	100%			

					Advokasi Koperasi dan Usaha Mikro	a. Jumlah Koperasi yang direvitalisasi;	20	20	20	0	0%			
						b. Jumlah Peserta Penyuluhan Perkoperasian Kepada Kelompok;	75	75	75	0	0%			
					Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM)	a. Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian;	150	0	150	150	100%			
						b. Jumlah UKM yang mengikuti Pelatihan Vocational.	100	0	100	100	100%			
					Program Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro	a. Presentase KUM yang produknya terstandarisasi								
						b. Presentase Akses Permodalan bagi KUM								
					Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif bagi KUM	a. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Produksi Bagi Koperasi dan Usaha Mikro;	40	40	20	20	100%			
						b. Jumlah Peserta pelatihan kewirausahaan	60	60	20	20	100%			
					Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	a. Jumlah Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi KUMKM (Rakor);	8	0	4	4	100%			
						b. Fasilitasi Akses Pembiayaan KUM melalui BUMN/S (unit);	4	0	4	4	100%			

						c. Jumlah survey, pendampingan dan appraisal;	20	20	5	5	100%			
						d. Fasilitasi Pengembangan Usaha KUM melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi;	14	0	14	0	0%			
						e. Jumlah Rakor pokjanis, SHAT,SIKP,WP;	8	8	15	15	100%			
						f. Jumlah penagihan;	50	50	42	42	100%			
					Pengembangan sarana pemasaran produk koperasi dan Usaha Mikro	a. Jumlah Penerbitan Tabloid KUMNAKER NEWS;	12	12	12	12	100%			
						b. Jumlah Event pameran Lokal;	2	2	0	0	0%			
						c. Jumlah Event pameran Regional;	4	2	2	1	50%			
						d. Jumlah Event pameran Nasional;	3	2	2	2	100%			
					Program Penempatan Dan Pengembangan Tenaga Kerja	a. Presentase Pencari Kerja Yang difasilitasi								
						b. Angka Sengketa pengusaha pekerja pertahun								
					Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	a. Jumlah peserta Service HP;	260 org	a. 80 org	64	0	0%			
						b. Jumlah peserta pelatihan tata boga;		0	60	0	0%			
					Fasilitasi hubungan industrial	a. Jumlah Perusahaan yang diberi Sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;	150	150	149	75	50%			

					b. Jumlah Kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan;	3	0	0	0	0%			
					c. Jumlah Kecamatan yang didata dan disurvei (KHL) dalam rangka penyusunan upah minimum kabupaten;	14	14	14	0	0%			
				Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.	a. Sosialisasi Bursa Tenaga Kerja dan Rekrutmen Tenaga Kerja;	210	600	50	50	100%			
					b. Jumlah Pendampingan PMI bermasalah;	5	5	35	35	100%			
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Prosentase Pencari Kerja yang dilatih BLK								
				Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	a. Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	120	117	100	100	100%			
				Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana kelembagaan pelatihan	a. Jumlah Peralatan dan asrama untuk pelatihan;	4	4	4	4	100%			
				Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat	a. Jumlah Kelompok Masyarakat Yang mendapatkan Bantuan Sarana Produksi Sesuai dengan Keahlian Yang di dapatkan;	19	2	0	0	0%			
				Penguatan Sarana Dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan	a. Jumlah Peralatan dan asrama untuk pelatihan;	1	0	1	1	100%			
DISPERDAGPRIN													

				URUSAN PERDAGANGAN									
				Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan									
				Pembinaan Usaha Perdagangan, promosi dan pemasaran	Jumlah Pameran Promosi Produk Unggulan Daerah	30	6	2	2	100%			
					Jenis Komoditi yang akan dipamerkan	20	4	3	3	100%			
					Jumlah fasilitasi Pembinaan pelaku usaha Perdagangan	20	4	6	6	100%			
				Pembinaan konsumen dan pengelolaan kemetrolgian legal	Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Peredaran Barang jasa	70	14	12	12	100%			
					Jumlah laporan informasi harga bahan pokok dan harga Sembilan Bahan Pokok dan Barang Penting lainnya	60	12	12	12	100%			
				Pengelolaan informasi perdagangan dan penyaluran barang dan jasa	Jumlah laporan informasi komoditas ekspor	60	12	12	12	100%			
					Jumlah pelaksanaan Batik Festival dan Food Festival	10	2	2	0	0%			
				Fasilitasi Dekranasda	Operasional Dekranasda	55	11	11	11	100%			
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Dacrah									
					Jumlah Pasar tradisional dan polowijo yang akan dibangun/direvitalisasi	65	4	4	4	100%			
				Pengembangan pasar tradisional									

					Peningkatan Pengawasan Pasar	Jumlah pasar Kabupaten yang dikelola kebersihannya	125	25	25	25	100%			
					Pengelolaan Pendapatan Pasar	Jumlah retribusi Pasar, Penagihan retribusi Pasar Daerah dan Pendataan retribusi Pasar Daerah	125	25	25	25	100%			
						Monitoring Pasar dan Pemantauan Pasar Daerah	60	12	12	12	100%			
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial									
					Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan pasar	Jumlah pasar yang terpelihara sarana dan prasarannya	60	12	12	12	100%			
					2. Meningkatnya pertumbuhan industri formal									
					Program Penataan dan Pengembangan Industri									
					Fasilitasi Pengembangan industri kecil menengah	Jumlah IKM potensial yang difasilitasi kemitraan industri dan field trip	150	28	30	30	100%			
						Jumlah kelompok yang mengikuti inkubasi wirausaha industri agro	10	2	2	2	100%			
						Jumlah short course pengembangan WUB yg dilaksanakan	10	2	2	2	100%			
						Pengembangan sentra produk OVOP unggulan Ringkel	10	2	2	2	100%			

					Pengembangan produk OVOP kerajinan kulit	5	1	1	1	100%			
					Jumlah IKM yg mendapat fasilitasi standarisasi produk IKM (sertifikasi HALAL, merk HKI, nutricion fact, SNI, MD, barcode	750	130	150	150	100%			
					Peningkatan teknologi, desain dan standarisasi industri								
					Jumlah Bimtek standarisasi	5	1	1	1	100%			
					Even Pekan Inno Crea IKM Sampang Hebat	5	1	1	1	100%			
					Klinik desain pengemasan IKM	5	1	1	1	100%			
					Pengemb. Layanan klinik berbasis Android dan market place IKM	5	1	1	1	100%			
					Pengembangan desain produk kerajinan dan batik	200	35	40	40	100%			
					Pembinaan dan pengawasan industri	15	3	3	3	100%			
					Jumlah sosialisasi peraturan Industri								
					Katalog IKM	500	100	100	100	100%			
					Program Pembinaan Lingkungan Sosial								
					Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat	10	2	2	2	100%			
					Jumlah Bantuan Hibah Peralatan Konveksi								
					Jumlah bantuan hibah Peralatan Mebel/Furniture	10	2	2	2	100%			
					3. Meningkatnya perdagangan sektor agribisnis								

				Program Pengembangan Perdagangan Agribisnis									
				Pengelolaan informasi usaha perdagangan agribisnis	Jumlah laporan hasil monitoring perdagangan sektor agribisnis	60	12	12	12	100%			
				Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran									
				Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah surat terkirim	5595	1235	1250	900	72%			
					Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	72	34	34	34	100%			
					Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang memperoleh jasa perizinan	183	60	60	60	100%			
					Cakupan pemenuhan jasa kebersihan	72	30	30	30	100%			
					Jumlah alat kebersihan yang disediakan	78	26	26	26	100%			
					Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa pendukung administrasi/teknis	71	20	20	20	100%			
				Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	147	49	50	50	100%			
					Jumlah barang cetakan	72	10	10	10	100%			
					Jumlah barang penggandaan	410	100	100	100	100%			
					Jumlah komponen instalasi listrik	18	13	15	15	100%			

						17	3	3	3	100%			
					Jumlah bahan bacaan yang disediakan								
						23921	536	536	536	100%			
					Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman rapat								
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah		78	50	50	50	100%			
					Jumlah koordinasi dalam daerah								
					Jumlah koordinasi luar daerah	314	74	74	74	100%			
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
				Pembangunan/Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor		0	0	0	0	0%			
					Jumlah gedung kantor yang dibangun								
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6	3	3	3	100%			
				Pengadaan/Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		0	0	0	0	0%			
					Jumlah kendaraan dinas R4 yang diadakan								
					Jumlah kendaraan dinas R2 yang diadakan	6	0	0	0	0%			
					Jumlah kendaraan dinas (R4) yang dipelihara	24	0	0	0	0%			
				Pengadaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6	6	6	6	100%			
					Jumlah pengadaan peralatan kantor								
					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	188	24	26	26	100%			
					Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	2	2	2	2	100%			

					Jumlah spanduk/umbul-umbul/bendera yang disediakan	18	6	6	6	100%			
					Jumlah komputer yang diadakan	7	1	2	2	100%			
					Jumlah printer yang diadakan	6	1	2	2	100%			
					Jumlah meubelair yang diadakan	6	2	2	2	100%			
					Jumlah meubelair yang dipelihara	300	50	50	50	100%			
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
					Pelaksanaan Bintek/Sosialisasi/Seminar	103	5	6	6	100%			
					Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik								
					Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	36	5	5	5	100%			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	42	4	4	4	100%			
					Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	1	1	1	1	100%			
					Jumlah promosi pelayanan publik perangkat daerah	6	2	2	2	100%			
DISKOPINDAG													

				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									
				Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Wirausaha Baru						1400	365	26%
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UM yang difasilitasi perijinannya						200	50	25%
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1. Jumlah koperasi yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan ;						5	0	0%
					2. Jumlah UM yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan						15	0	0%
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1. Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan ;						40	0	0%
					2. Jumlah peserta pelatihan peningkatan produksi						60	0	0%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu								

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun							3	0	0%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Tahun 2021 yang disusun							1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Tahun 2021 yang disusun							1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Tahun 2021 yang disusun							1	1	100%
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Tahun 2021 yang disusun							1	1	100%
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LPPD, LKPI, SAKIP LKJIP Perangkat Daerah yang disusun							4	0	0%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang baik dan tepat waktu									
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN selama 1 tahun							144	250	174%
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan							50	30	60%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun							1	0	0%
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Laporan Semesteran SKPD yang disusun							18	0	0%

				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase aparaturnya yang mengikuti peningkatan kapasitas aparaturnya								
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat						15	5	33%
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bintek implementasi perundang-undangan						-		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran								
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang disediakan						26	8	31%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan						26	6	23%
					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan yang disediakan						13	8	62%
					Jumlah Spanduk, Bendera, Umbul-umbul yang disediakan						3	0	0%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan						12	6	50%
					Jumlah belanja penggandaan yang disediakan						6000	1300	22%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan						3	6	200%
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu						750	200	27%

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah						40	14	35%
					2. Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah						20	4	20%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik								
				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan						0	0	0%
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan						10	0	0%
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor yang dibangun/direvitalisasi								
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran								
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim						1250	900	72%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air, telepon yang dibayarkan						40	80	200%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penjaga Gudang						4	4	100%
					Jumlah Penjaga Malam Kantor						6	6	100%
					Jumlah Petugas Kebersihan Kantor						8	8	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara						5	10	200%

					2. Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan						68	35	51%
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara					20	0	0%
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara					20	4	20%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara					3	2	67%
					Penataan Organisasi	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran							
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Jumlah dokumen SKM					1	0	0%
						2. Jumlah Promosi pelayanan Publik Perangkat Daerah					2	0	0%
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
					PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
					Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar kabupaten yang dibangun / direvitalisasi					2	2	100%
					Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar yang terpelihara Sarana Prasarananya					25	50	200%
					PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA								

				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Kabupaten yang Dikelola Kebersihannya						25	50	200%
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Retribusi Pasar, Penagihan Retribusi Pasar Daerah, dan Pendataan Retribusi Pasar Daerah						25	50	200%
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									
				MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Perdagangan Sektor Agribisnis						12	6	50%
				PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR									
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Informasi Harga Bahan Pokok dan Harga Sembilan Bahan Pokok serta Barang Penting Lainnya						12	6	50%
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									
				PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN									

				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan tera dan tera ulang						14	4	29%
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Peredaran Barang Jasa						14	0	0%
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									
				PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI									
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jumlah pelaksanaan event promosi ;						2	0	0%
					2. Operasional Dekranasda						11	6	55%
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	1. Jenis Komoditi yang akan dipamerkan ;						4	4	100%
					2. Jumlah Pameran Promosi Produk Unggulan Daerah ;						6	1	17%
					3. Jumlah Fasilitasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan						4	1	25%
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									
				PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA									

				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan kebijakan							3	0	0%
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Even pekan INNO Crea IKM Sampang Hebat ;							1	0	0%
					2. Jumlah IKM potensial yang difasilitasi kemitraan industri dan field trip ;							30	0	0%
					3. Pengembangan desain produk kerajinan dan batik ;							1	1	100%
					4. Pengembangan produk OVOP kerajinan ;							2	0	0%
					5. Pengembangan sentra produk OVOP unggulan Batik Berlatar Ringkel							2	2	100%
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1. Jumlah Bimtek standarisasi ;							1	0	0%
					2. Pengembangan Klinik desain pengemasan IKM ;							1	1	100%
					3. Pengemb. Layanan klinik berbasis Android dan marketplace IKM ;							1	0	0%

					4. Jumlah IKM yg mendapat fasilitas standarisasi produk IKM (sertifikasi HALAL, merk HKI, nutricion fact, SNI,MD, barcode						150	42	28%
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Jumlah kelompok yang mengikuti inkubasi wira usaha industri;						8	5	63%
					2. jumlah short course inovasi produk pengembangan WUB industri						3	0	0%
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA									
				PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (UI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI)									
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup UI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah sosialisasi peraturan Industri dan pengawasan industri						3	1	33%
				PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK UI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN									
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SHINas	1. katalog IKM dan data IKM ;						1	1	100%
					2. Layanan IKM berbasis Android						1	0	0%

Evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sasaran Strategis Dinas Kopetrasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1 :

“Meningkatnya Volume Perdagangan”

INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Volume Usaha Perdagangan

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis yang pertama didukung oleh 1 (Satu) Indikator Kinerja yaitu

1. Indikator kinerja **Volume Usaha Perdagangan** adalah jumlah/nilai transaksi perdagangan sembilan bahan pokok dan barang penting lainnya selama tahun berjalan

SASARAN STRATEGIS 2 :

“Meningkatnya Pertumbuhan Industri Formal”

INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Persentase Pertumbuhan Industri Formal

Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis yang pertama didukung oleh 1 (dua) Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Kinerja **Persentase Pertumbuhan Industri Formal** adalah Pertumbuhan Industri formal yang merupakan pelaku usaha industri yang telah memiliki izin

merupakan perhitungan rumus operasional yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah industri tahun } N - \text{Jumlah industri tahun } N-1}{\text{Jumlah industri tahun } N-1} \times 100\%$$

SASARAN STRATEGIS 3 :

“Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UM Mandiri”

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Persentase Koperasi Sehat
2. Persentase Pertumbuhan UM Mandiri

1. Indikator **Persentase Koperasi Sehat** adalah indikator baru hasil penajaman dengan formula rumusan Jumlah koperasi berkualitas th N dibanding dengan jumlah koperasi aktif th N.
2. Indikator **Persentase Pertumbuhan UM Mandiri** merupakan indikator baru hasil penajaman dengan rumusan penambahan jumlah UM Mandiri pada tahun berjalan dikurangi dengan jumlah UM Mandiri pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah UM Mandiri pada tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis terhadap indikator kinerja pelayanan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan. Berdasarkan Renstra 2019-2024 target dan realisasi indikator sasaran yang mencerminkan indikator kinerja pelayanan DISKOPINDAG dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DISKOPINDAG

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2019	2020	2021	2022	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Volume usaha perdagangan			878,38	873,85	875,90	884,10	877,99	925,7	892,90	902,80	
2	Persentase pertumbuhan industri formal			2,60	3,13	3,17	2,80	4,9	4,68	3,96	4,07	
3	Persentase koperasi sehat			48,16	52,70	46,98	51,06	46,98	51,06	49,47	50,69	
4	Persentase pertumbuhan UM mandiri			2,76	3,18	3,42	3,48	4,15	18,14	3,54	3,60	

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, antara lain :

1. Data-data yang tersedia kadang tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan. Untuk itu diperlukan pendataan ulang terhadap data-data maupun informasi penting yang berhubungan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan melalui kegiatan-kegiatan pendataan maupun perencanaan;
2. Masih kurangnya pemahaman stakeholder terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pokok dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Seringnya terjadi kendala teknis maupun non teknis selama tahun anggaran berlangsung, sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan kegiatan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Urusan Wajib Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Diskumnaker sebagai badan perencanaan pembangunan daerah memiliki pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah dan konsistensi perencanaan hingga tahapan penganggaran.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga kerja Kabupaten Sampang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,serta tata kerja dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja kabupaten sampang, Dengan adanya SOTK nomenklatur baru yang relatif sama maka diharapkan ada tatahubungan kerja yang baik, efektif dan efisien antara organisasi di tingkat pusat dan daerah. Kelembagaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja

Kabupaten Sampang terbentuk pada tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 melalui Peraturan Bupati Sampang Nomor 54 Tahun 2017.

Sebagaimana termuat dalam Renstra Diskumnaker Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, isu – isu strategis yang dihadapi Diskumnaker dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengembangan Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja dalam bidang manajemen, informasi, pemasaran, bahan baku, permodalan dan perkuatan kapasitas pengelola usahanya
2. Belum optimalisasi pemberdayaan SDM dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, khususnya dalam peningkatan kompetensi untuk menunjang kelancaran sesuai tugas pokok dan fungsinya termasuk kompetensi teknis serta atitude.
3. Belum optimalnya Sarana dan prasarana Dinas Koperai Usaha mikro dan tenaga kerja Kabupaten Sampang dalam hal dalam melakukan pembinaan jangkauan wilayah terpencil;
4. Belum optimalisasi penggunaan dana pemberdayaan untuk memberdayakan Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, yang meliputi peningkatan kapasitas usaha dan kompetensi SDM pengelola Koperasi Usaha mikro;
5. Belum doptimalnya Perluasan layanan informasi transmigrasi guna Perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja;
6. Layanan pengawas ketenagakerjaan agar penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum optimal;

Permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang tidak tercapainya pada :

- a. Indikator Persentase koperasi aktif bersertifikat yang tidak tercapai adalah Penyebab Penurunan kinerja dikarenakan koperasi yang telah menerima sertifikat kurun waktu 3 tahun lebih sudah mengalami parpanjangan tidak melakukan permohonan perpanjangan , dan juga koperasi yang melakukan perpanjangan tidak teralisasi karena tidak memenuhi kriteria baik dari jumlah aset, volume usaha , SHU tidak mengalami peningkatan secara berjenjang, sehingga kurang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan

sertifikat NIK kedua kalinya. Maka pada sasaran kinerja yang dituangkan program kegiatan target sasaran pada Renstra seringkali tidak tercapai.

Solusi yang dilakukan mengupayakan dalam peningkatan Persentase koperasi aktif bersertifikat yaitu :

- ✓ Melakukan pembinaan penyuluhan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) melalui pendampingan pembuatan laporan RAT kepada pengurus koperasi,
- ✓ Melakukan pemetaan koperasi yang akan berakhir masa berlakunya Sertifikat NIK untuk kemudian melakukan persiapan permohonan kembali dengan memenuhi persyaratan yang sudah ada.
- ✓ Melakukan pembinaan secara intensif dan juga melakukan monitoring evaluasi kepada gerakan koperasi disamping sinergi dengan tim satgas yang dari provinsi.

b. Indikator Persentase Peningkatan SHU

Indikator Persentase Peningkatan SHU merupakan indikator kinerja form rumusan Jumlah SHU tahun berjalan (th n) 2019 dibanding dengan Jumlah SHU tahun sebelumnya (th n-1) 2018 target tahun 2019 sebesar 4,99% dengan terealisasi sebesar 4,76% capaian kinerja tahun 2019 tidak tercapai.

- ✓ Penyebab Penurunan persentase SHU dikarenakan adanya koperasi yang anggotanya kurang lancar dalam pembayaran kewajiban kepada koperasi, sehingga terjadi penurunan omset dan pendapatan koperasi.
- ✓ Solusi yang dilakukan untuk peningkatan SHU yaitu :
 - Memberikan pembinaan kepada pengurus dan anggota standarisasi manajemen pengelolaan perkoperasian.
 - Melakukan Monitoring dan evaluasi secara intensif oleh tenaga pendamping Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) dan Tenaga Pendamping Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (TP PK2UKM) kepada Koperasi Memberikan pelatihan Sistem Operasional Manajemen (SOM) dan Sistem Operasional Prosedural)

Dampak terhadap pencapaian visi, dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional. Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra. Sesuai dengan Visi Kabupaten Sampang “Sampang Hebat Bertabat” pada Misi kedua “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah dan Pedesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tujuan “Meningkatkan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pedesaan melalui Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”, Sasaran (a) Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Usaha Mikro (b) Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah. Reformasi koperasi meliputi pembenahan terhadap 3 (tiga) aspek yang terdiri dari (a) rehabilitasi, (b) reorientasi koperasi dan (c) pengembangan koperasi, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi maka dapat diidentifikasi tantangan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya dalam kedepan maka ada beberapa peluang Koperasi dan Usaha Mikro yakni :

- ✓ Kualitas SDM di koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan Usaha Mikro Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota, pengurus, pengawas, dan Pembina koperasi serta Usaha Mikro yang diindikasikan dari jumlah koperasi yang ber-RAT dan perkembangan omset dari Koperasi dan Usaha Mikro.
- ✓ Kerjasama koperasi dalam penyampaian data, rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi. Menyebabkan data yang dimiliki oleh koperasi kurang akurat. Dengan demikian, koperasi kurang terbuka dalam penyampaian data.
- ✓ Daya tahan berusaha pelaku Usaha Mikro, daya tahan berusaha pelaku Usaha Mikro masih lemah. Jiwa kewirausahaan yang dimiliki belum kuat. Hal ini diindikasikan dengan banyak pelaku usaha di Kota Surabaya yang sering berubah jenis usaha yang dikelola dalam jangka waktu pendek.
- ✓ Jumlah koperasi produsen dan koperasi sekunder, jumlah koperasi dan Usaha Mikro yang relative besar serta antusias masyarakat mendirikan koperasi tinggi. Hal ini menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Namun, di Kota Surabaya belum memiliki koperasi produsen dan koperasi sekunder. Disinilah tantangan, untuk mendirikan koperasi produsen dan koperasi sekunder di Kota Surabaya.

- ✓ Akses Permodalan dan pemasaran, rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan Usaha Mikro kepada sumber-sumber pembiayaan dan tingginya tingkat suku bunga sehingga belum terjalin kemitraan dengan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Selain itu, permasalahan pemasaran adalah akses pasar yang terbatas, posisi tawar dan manajemen usaha yang lemah. Permasalahan Usaha Mikro di bidang produksi adalah ijin usaha terbatas, kualitas produk yang rendah dan tidak stabil dan kontinuitas produksi yang tidak stabil.
- ✓ Produk impor, terjadinya globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah masuk di Indonesia akan menjadi tantangan bisnis bagi pelaku Koperasi dan Usaha Mikro
- ✓ yang belum siap bersaing. Mayoritas pelaku bisnis di Kota Surabaya belum mampu beradaptasi dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya, akan meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi kualitas produk yang dihasilkan.
- ✓ Standarisasi produk, produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro masih dinyatakan rendah, sehingga akan menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro dan kecil belum layak secara ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya melalui wadah badan hukum koperasi untuk memperkuat posisinya serta menjalin kerjasama. Selain itu, didukung pula pada aspek manajemen, teknologi, dan rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku usaha.

Berikut peluang pengembangan pelayanan Diskumnaker kedepan adalah

- ✓ Pertumbuhan pasar lokal dan regional, laju pertumbuhan yang semakin pelik dan persaingan yang semakin ketat, dengan terbukanya pasar didalam negeri dan pasar global telah membuat akses baru untuk Usaha Mikro bersaing secara global.
- ✓ Pertumbuhan jumlah koperasi, jumlah koperasi dan Usaha Mikro yang relative besar serta antusias masyarakat mendirikan koperasi tinggi. Hal ini menunjukkan potensi yang cukup besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Karena koperasi dan Usaha Mikro merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis kekeluargaan. Hal ini juga merupakan peluang bagi

Diskumnaker, semakin berkembangnya kelompok-kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- ✓ Animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha, wawasan masyarakat semakin luas dan terbuka untuk berkoperasi dan berwirausaha. Pentingnya kedua hal tersebut dalam kehidupan masa kini, semarak berkoperasi dan berwirausaha semakin tinggi.
- ✓ Legalitas dan peluang usaha koperasi, dengan adanya legalitas yang dimiliki oleh Koperasi dapat lebih mudah mengakses ke sumber-sumber daya produktif, seperti akses teknologi, pasar, dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, memudahkan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan ternama.
- ✓ Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku Usaha Mikro, perkembangan usaha menjadi sebuah prioritas yang selalu diinginkan oleh setiap pelaku bisnis Usaha Mikro. Bagi siapa saja para pelaku usaha utamanya dibidang mikro, kecil dan menengah selalu berharap dan bercita-cita agar usahanya yang dimulai dari kecil bisa menjadi besar dan bisa menjadikan pemiliknya sebagai pengusaha yang sukses.

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program. Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- ✓ Masih diperlukan inovasi dalam pengembangan Koperasi Usaha mikro dan tenaga kerja dalam bidang manajemen, informasi, pemasaran, bahan baku, permodalan dan perkuatan kapasitas pengelola usahanya. Diperlukan optimalisasi pemberdayaan SDM dilingkungan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, khususnya dalam peningkatan kompetensi untuk menunjang kelancaran sesuai tugas pokok dan fungsinya termasuk kompetensi teknis serta attitude.
- ✓ Masih diperlukan optimalisasi penggunaan dana pemberdayaan untuk memberdayakan Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, yang meliputi peningkatan kapasitas usaha dan kompetensi SDM pengelola Koperasi Usaha mikro
- ✓ Masih diperlukan Perluasan layanan informasi transmigrasi guna Perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja. Perlu

fungsi layanan pengawas ketenagakerjaan agar penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial terfasilitasi

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

LEMAHNYA kualitas SDM pelaku usaha yang berdampak pada menurunnya Inovasi produk layanan sehingga perlu penumbuhan pelatihan berbasis kompetensi yang berpijak pada optimalisasi produk unggulan daerah guna dapat meningkatnya produksi, distribusi dan Promosi melalui jalin kemitraan Dunia Usaha berbasis layanan informasi yang dapat menunjang destinasi pariwisata yang dapat memperluas penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat sampang.

Faktor – faktor kunci pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskumnaker berhasil mencapai hasil-hasil yang direncanakan sebagai berikut :

- ✓ Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan Menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Diskumnaker secara ideal;
- ✓ Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
- ✓ Perkembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan;
- ✓ Perkembangan teknologi dan informasi.

2.3.2 Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD.

Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

➤ Aspek kajian kelembagaan

Fungsi Disperdagprin sangat strategis di dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan di daerah dimana keberadaan Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Sampang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sampang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sampang.

Adapun kedudukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang adalah:

- Merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perdagangan dan Perindustrian serta tugas pembantuan.

Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah :

- a. perumusan kebijakan bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perdagangan dan Perindustrian.
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang Perdagangan dan Perindustrian
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

➤ **Aspek kajian dari sumber daya manusia**

Aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran OPD bisa terwujud. Kondisi *existing* jumlah pegawai saat ini adalah 129 pegawai, terdiri atas 126 pegawai struktural dan 3 pegawai jabatan fungsional. Kemudian faktor yang mempengaruhi secara internal antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi eksternal meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian internal atau pengawasan.

➤ **Aspek kajian dari sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana penunjang pada umumnya dalam kondisi baik namun keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung perkantoran (Unit 1) yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat,

➤ **Aspek kajian dari jumlah anggaran**

Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat.

Yang menjadi isu-isu penting pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumberdaya manusia pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang belum merata di setiap lininya.
2. Belum adanya data potensi sector perdagangan dan industri yang lengkap dan akurat sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan.
4. Industri Kecil Menengah (IKM) dalam melaksanakan inovasi teknologi dan sistem kerja masih lemah walaupun telah diberikan pelatihan.
5. IKM kurang berminat untuk menguji produknya karena masih dibutuhkan inovasi akan pentingnya mutu produk IKM.
6. IKM belum optimal dalam memanfaatkan internet dan pameran sebagai media promosi.
7. Sebagian IKM kurang terbuka untuk memberikan data perusahaan.
9. Sumber daya pelaku usaha perdagangan masih lemah.
10. Pelaksana pengawasan pelaku usaha perdagangan yang kurang
12. Masih sering ditemukannya produk barang dan jasa yang beredar tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
14. Semakin kompetitifnya persaingan perdagangan baik dalam maupun luar negeri.
16. Perlunya penciptaan iklim usaha yang kondusif.
17. Adanya pembinaan teknis terhadap pelaku industri mikro, kecil dan menengah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana kerja harusnya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Untuk lebih jelas tentang Rancangan Awal RKPD dan Hasil Analisis Kebutuhannya dapat terlihat pada Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 pada tabel berikut ini :

RANCANGAN AWAL RKP									HASIL ANALISIS KEBUTUHAN									Catatan Penting	
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja			Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana (Rp.)		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									782,142,721	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									782,142,721
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									150,000,027	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI									150,000,027
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									150,000,027	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota									150,000,027
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi Yang Melaporkan Pelaksanaan RAT Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Monev Koperasi	Persentase koperasi aktif bersertifikat	81.52 %	75 koperasi 10 koperasi 20 koperasi	53.02 %	72,710,984	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi Yang Melaporkan Pelaksanaan RAT Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Monev Koperasi	Persentase koperasi aktif bersertifikat	81.52 %	75 koperasi 10 koperasi 20 koperasi	53.02 %	72,710,984		
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi Yang Akan dibubarkan Jumlah Koperasi Yang Dibina Jumlah Monev Kepada Koperasi cabang yang wilayah kerjanya di kabupaten Sampang	Persentase koperasi aktif bersertifikat	81.52 %	110 koperasi 10 koperasi 1 kegiatan	53.02 %	77,289,043	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi Yang Akan dibubarkan Jumlah Koperasi Yang Dibina Jumlah Monev Kepada Koperasi cabang yang wilayah kerjanya di kabupaten Sampang	Persentase koperasi aktif bersertifikat	81.52 %	110 koperasi 10 koperasi 1 kegiatan	53.02 %	77,289,043		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									0	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									0
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									0	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota									0
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian Jumlah UM yang mengikuti pelatihan Vocational	Persentase Peningkatan SHU	81,52 %	3 koperasi 100 orang	5,07 %	0	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian Jumlah UM yang mengikuti pelatihan Vocational	Persentase Peningkatan SHU	81,52 %	3 koperasi 100 orang	5,07 %	0		
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									307,142,694	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									307,142,694
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									307,142,694	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan									307,142,694
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah Data Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	97,22 %	1400 UM	1,22 %	49,999,958	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah Data Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	97,22 %	1400 UM	1,22 %	49,999,958		

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah UM yang difasilitasi perijinannya	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	97,22 %	180 UM	1,22 %	52,209,140		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah UM yang difasilitasi perijinannya	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	97,22 %	180 UM	1,22 %	52,209,140	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan Jumlah UM yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	97,22 %	5 koperasi 15 UM	1,22 %	204,933,596		Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan Jumlah UM yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	97,22 %	5 koperasi 15 UM	1,22 %	204,933,596	
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									325,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM									325,000,000
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									325,000,000	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil									325,000,000
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase UM yang berlegalitas	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan peningkatan produksi	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	0,39 %	40 orang 40 orang	1,22 %	325,000,000		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase UM yang berlegalitas	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan peningkatan produksi	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	0,39 %	40 orang 40 orang	1,22 %	325,000,000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									18,397,868,609	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									18,397,868,609
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									14,371,538,638	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									14,371,538,638
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									23,999,827	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									23,999,827
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sampang, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Renja Jumlah Dokumen Renstra	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	1 dokumen 1 dokumen	100 %	4,000,000		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sampang, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Renja Jumlah Dokumen Renstra	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	1 dokumen 1 dokumen	100 %	4,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan-RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan-RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	

				Tepat Waktu									Tepat Waktu					
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen DPA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen DPA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan-RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan-RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen LKPJ Jumlah Dokumen LPPD Jumlah Dokumen SAKIP	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 %	3,999,875	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen LKPJ Jumlah Dokumen LPPD Jumlah Dokumen SAKIP	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 %	3,999,875	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,781,175,150	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								12,781,175,150	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji Jumlah ASN yang mendapatkan TPP Jumlah Honor Kontrak Daerah Jumlah tim/panitia pelaksana kegiatan SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	144 orang 144 orang 20 orang 18 orang	100 %	12,773,175,210	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji Jumlah ASN yang mendapatkan TPP Jumlah Honor Kontrak Daerah Jumlah tim/panitia pelaksana kegiatan SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	144 orang 144 orang 20 orang 18 orang	100 %	12,773,175,210	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,970	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,970	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	2 dokumen	100 %	3,999,970	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	100 %	2 dokumen	100 %	3,999,970	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15,120,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15,120,000	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	100 %	1 ASN	0.1 %	15,120,000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	100 %	1 ASN	0.1 %	15,120,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah									260,351,661	Administrasi Umum Perangkat Daerah									260,351,661
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	6 jenis	100 %	14,976,634		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	6 jenis	100 %	14,976,634	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Jumlah Spanduk, Bendera, Umbul-umbul	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	26 jenis 6 jenis 3 jenis	100 %	45,868,374		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Jumlah Spanduk, Bendera, Umbul-umbul	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	26 jenis 6 jenis 3 jenis	100 %	45,868,374	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ATK yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	50 jenis	100 %	40,881,908		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ATK yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	50 jenis	100 %	40,881,908	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan Jumlah Barang Penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	12 jenis 6000 lembar	100 %	34,999,745		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan Jumlah Barang Penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	12 jenis 6000 lembar	100 %	34,999,745	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	3 jenis	100 %	3,840,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	3 jenis	100 %	3,840,000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	750 orang	100 %	20,000,000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	750 orang	100 %	20,000,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Rakor Dalam Daerah Jumlah Rakor Luar Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	40 OK 20 OK	100 %	99,785,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Rakor Dalam Daerah Jumlah Rakor Luar Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	100 %	40 OK 20 OK	100 %	99,785,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									155,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									155,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Komputer, Laptop dan Peralatan Kantor lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	12 unit	100 %	92,000,000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Komputer, Laptop dan Peralatan Kantor lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	12 unit	100 %	92,000,000	

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang akan dibangun	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1 unit	100 %	63,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang akan dibangun	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	1 unit	100 %	63,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
964,992,000									964,992,000								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Surat yang dikirim	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1250 surat	100 %	2,992,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Surat yang dikirim	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1250 surat	100 %	2,992,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telepon yang dibayarkan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	40 rekening	100 %	800,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telepon yang dibayarkan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	40 rekening	100 %	800,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Penjaga Gudang Jumlah Penjaga Malam Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4 orang 6 orang 8 orang	100 %	162,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Penjaga Gudang Jumlah Penjaga Malam Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	4 orang 6 orang 8 orang	100 %	162,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
154,920,000									154,920,000								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas (R2) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas (R3) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas (R4) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan perawatan rutin	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100 %	48 unit 14 unit 6 unit 5 unit	100 %	90,200,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas (R2) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas (R3) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas (R4) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan perawatan rutin	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100 %	48 unit 14 unit 6 unit 5 unit	100 %	90,200,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100 %	20 jenis	100 %	14,800,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100 %	20 jenis	100 %	14,800,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100 %	3 unit	100 %	49,920,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	100 %	3 unit	100 %	49,920,000
Penataan Organisasi									Penataan Organisasi								
15,980,000									15,980,000								
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen SKM Jumlah Kegiatan Pameran dan Pawai yang diikuti	Persentase penataan organisasi yang dilakukan	100 %	1 dokume n 2 kegiatan	100 %	15,980,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen SKM Jumlah Kegiatan Pameran dan Pawai yang diikuti	Persentase penataan organisasi yang dilakukan	100 %	1 dokume n 2 kegiatan	100 %	15,980,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								
3,606,325,298									3,606,325,298								

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								1,549,838,885	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								1,549,838,885
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Pasar tradisional dan polowijo yang akan dipelihara	Volume usaha perdagangan	32 %	8 unit	924.1 Milyar	1,549,838,885	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Pasar tradisional dan polowijo yang akan dipelihara	Volume usaha perdagangan	32 %	8 unit	924.1 Milyar	1,549,838,885
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								2,056,486,413	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								2,056,486,413
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Pasar Kabupaten yang Dikelola Kebersihannya	Volume usaha perdagangan	32 %	25 pasar	924.1 Milyar	1,549,992,213	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Pasar Kabupaten yang Dikelola Kebersihannya	Volume usaha perdagangan	32 %	25 pasar	924.1 Milyar	1,549,992,213
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Retribusi Pasar, Penagihan Retribusi PasarDaerah, dan Pendataan Retribusi Pasar Daerah	Volume usaha perdagangan	32 %	25 pasar	924.1 Milyar	506,494,200	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Retribusi Pasar, Penagihan Retribusi PasarDaerah, dan Pendataan Retribusi Pasar Daerah	Volume usaha perdagangan	32 %	25 pasar	924.1 Milyar	506,494,200
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								124,999,788	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								124,999,788
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/ Kota								49,999,836	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Kabupaten/ Kota								49,999,836
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Perdagangan Sektor Agribisnis	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	340 Miliar Rp	12 bulan	340 Milyar	49,999,836	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Perdagangan Sektor Agribisnis	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	340 Miliar Rp	12 bulan	340 Milyar	49,999,836
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								74,999,952	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								74,999,952
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	Jumlah Laporan Informasi Harga Bahan Pokok dan Harga Sembilan Bahan Pokok serta Barang Penting Lainnya	Volume usaha perdagangan	340 Miliar Rp	12 bulan	924.1 Milyar	74,999,952	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	Jumlah Laporan Informasi Harga Bahan Pokok dan Harga Sembilan Bahan Pokok serta Barang Penting Lainnya	Volume usaha perdagangan	340 Miliar Rp	12 bulan	924.1 Milyar	74,999,952
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								95,003,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								95,003,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								95,003,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								95,003,000
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran.	Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Peredaran Barang Jasa	Volume usaha perdagangan	15,90 %	13 kec	924.1 Milyar	75,003,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran.	Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Peredaran Barang Jasa	Volume usaha perdagangan	15,90 %	13 kec	924.1 Milyar	75,003,000

Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran.	Jumlah Pengawasan UTPP, BDKT dan Peredaran Barang Jasa	Volume usaha perdagangan	15,90 %	13 kec	924.1 Milyar	20,000,000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran.	Jumlah Pengawasan UTPP, BDKT dan Peredaran Barang Jasa	Volume usaha perdagangan	15,90 %	13 kec	924.1 Milyar	20,000,000
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								
200,001,885									200,001,885								
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								
200,001,885									200,001,885								
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran	Jumlah Pameran Promosi yang diikuti	Nilai ekspor Perdagangan	15,90 %	1 kali	17 Milyar	100,001,404	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran	Jumlah Pameran Promosi yang diikuti	Nilai ekspor Perdagangan	15,90 %	1 kali	17 Milyar	100,001,404
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran	Jumlah Fasilitas Operasional Dekranasda	Nilai ekspor Perdagangan	15,90 %	12 bulan	17 Milyar	100,000,481	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran	Jumlah Fasilitas Operasional Dekranasda	Nilai ekspor Perdagangan	15,90 %	12 bulan	17 Milyar	100,000,481
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
297,999,716									297,999,716								
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI									PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								
262,024,557									262,024,557								
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								
262,024,557									262,024,557								
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisi industri	Jumlah Bimtek standarisasi Jumlah IKM yg mendapat fasilitas standarisasi produk IKM (sertifikasi HALAL, merk HKI, nutrition fact, SNI, MD, barcode Jumlah mesin desain kemasan yang tersedia Pengembangan Klinik desain pengemasan IKM	Persentase pertumbuhan industri formal	39,97 %	3 kelompok 150 produk 2 unit 1 paket	2.8 %	231,211,313	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisi industri	Jumlah Bimtek standarisasi Jumlah IKM yg mendapat fasilitas standarisasi produk IKM (sertifikasi HALAL, merk HKI, nutrition fact, SNI, MD, barcode Jumlah mesin desain kemasan yang tersedia Pengembangan Klinik desain pengemasan IKM	Persentase pertumbuhan industri formal	39,97 %	3 kelompok 150 produk 2 unit 1 paket	2.8 %	231,211,313
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisi industri	Jumlah diseminasi dan workshop labelling dan kemasan produk IKM Jumlah pembangunan dan pengembangan Rumah Kemasan	Persentase pertumbuhan industri formal	39,97 %	1 kegiatan 1 paket	2.8 %	30,813,244	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisi industri	Jumlah diseminasi dan workshop labelling dan kemasan produk IKM Jumlah pembangunan dan pengembangan Rumah Kemasan	Persentase pertumbuhan industri formal	39,97 %	1 kegiatan 1 paket	2.8 %	30,813,244
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA									PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								
15,205,626									15,205,626								
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota									Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								
15,205,626									15,205,626								

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	Jumlah katalog IKM dan data IKM Jumlah monitoring pengawasan perizinan IKM	Persentase pertumbuhan industri formal	39,97 %	20 buku 36 kali	2.8 %	15,205,626	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	Jumlah katalog IKM dan data IKM Jumlah monitoring pengawasan perizinan IKM	Persentase pertumbuhan industri formal	39,97 %	20 buku 36 kali	2.8 %	15,205,626		
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									20,769,533	20,769,533
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									20,769,533	20,769,533
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang memiliki standarisasi industri	Jumlah sosialisasi peraturan industri	Persentase pertumbuhan industri formal	63,27 %	1 kali	2.8 %	20,769,533	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase IKM yang memiliki standarisasi industri	Jumlah sosialisasi peraturan industri	Persentase pertumbuhan industri formal	63,27 %	1 kali	2.8 %	20,769,533		
TOTAL									TOTAL									19,478,011,046	19,478,011,046

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja tahun 2022 juga penting untuk memperhatikan usulan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena semua kegiatan yang dilakukan harus bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Sampang. Namun, semua usulan-usulan tersebut perlu ditelaah dan disaring berdasarkan skala prioritas mana yang lebih dulu harus dikerjakan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan secara efisien dan efektif. Adapun usulan-usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut diperoleh dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Laporan Hasil Musrenbang Kec, Tahun : 2022

OPD Penanggungjawab : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	N	I	H	I	L




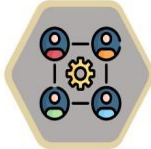



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 a. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penentuan prioritas pembangunan nasional mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024. Terdapat sembilan misi dalam upaya penjabaran dari visi pemerintah yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

PRIORITAS NASIONAL						
						
PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 5	PN 6	PN 7
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sejalan dengan kondisi terkini khususnya terkait pemulihan pandemi COVID-19, pemerintah menetapkan tema pembangunan dalam RKP 2022 yaitu “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Adapun Pembangunan Nasional tahun 2022 di prioritaskan pada tujuh hal yaitu

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi

pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan; 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; 3) Terpenuhinya layanan dasar; 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda; Terwujudnya pengentasan kemiskinan; dan 5) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu 1) menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya; 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan.; 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial; 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat; Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa; Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif.

5. Memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar; 2) Meningkatnya konektivitas wilayah; 3) Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan; 4) Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien; 5) Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;

Ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup; 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; 3) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik;

Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukam, ditetapkan sasaran yaitu memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Menguatnya stabilitas Polhukam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik.

Adapun dalam penyusunan RENJA DISKOPINDAG 2022 berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022; RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025.

b. Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) berdasarkan PMDN 17 Tahun 2021

Keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari capaian dan penetapan target indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah. Adapun Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 berdasarkan target RKPD dan target nasional berdasarkan PMDN 17 Tahun 2021.

Tabel Indikator Kinerja Daerah Berdasarkan Urusan Perangkat Daerah Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD) berdasarkan PMDN 17 Tahun 2021	Satuan	Target RKPD Tahun 2022	Target Nasional Tahun 2022
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Persentase Koperasi Aktif Bersertifikat	%	53,02	-
	Persentase Pertumbuhan UM Mandiri	%	3,48	-
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas*	%	11,66	50%
	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha*	%	5,84	50%
PERDAGANGAN				
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	10,50	
	Pertumbuhan nilai ekspor non migas*	%	0,82	5,96% - 7.86%
	Tertib Usaha*	%	31,86	55% – 75%
	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*	%	26,85	-
	Persentase kinerja realisasi pupuk*	%	12,00	-
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku*	%	30,32	50-75%
	Persentase penanganan pengaduan konsumen*	%	90,00	91%
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok*	%	38,49	5.90%
	Inflasi Pangan bergejolak*	%	3,02	3%-5%
PERINDUSTRIAN				
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri %	%	5,58	-
	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas*	%	5,58	6.80%
	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB*	%	3,72	18.30%
	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (Rp Juta)*	juta rupiah	95,15	151.9 (Nilai)

	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas*	orang	1.256	20.6 juta
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. miliar)*	miliar rupiah	13,16	425.3 Triliun

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik serta merupakan sesuatu yang akan dicapai. Tujuan ini menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil ingin / akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan dalam periode rencana strategis.

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022 sebagaimana dalam tabel berikut:

TUJUAN & SASARAN DISKOPINDAG TAHUN 2022

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Tahun 2022
1	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan	Nilai Ekspor Perdagangan	1. Meningkatnya Volume Perdagangan	1. Volume Usaha Perdagangan	884,10 M
			2. Meningkatnya pertumbuhan industri formal	1. Persentase Pertumbuhan Industri Formal	2,80%
			3. Meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UM Mandiri	1. Persentase Koperasi Sehat	51,06%
	2. Persentase UM Mandiri	3,42%			

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang Tahun 2022

Dalam merumuskan program kegiatan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan salah satunya yaitu pencapaian visi dan misi kepala daerah. Merujuk pada RPJMD Kabupaten Sampang, Diskopindag mendukung pada pencapaian **misi 2** yaitu **"Mewujudkan**

kemandirian ekonomi daerah dan pedesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata dan ekonomi kreatif". Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Diskopindag yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

a. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mempunyai tujuan organisasi, yaitu "meningkatnya daya saing sektor perdagangan". Selanjutnya terdapat 3 sasaran yang harus dicapai;

Sasaran 1 "Meningkatnya Volume Perdagangan" untuk mendukung sasaran pertama, program yang terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
2. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran 2 "Meningkatnya Pertumbuhan Industry Formal", selanjutnya untuk mendukung sasaran kedua, program yang terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Sasaran 3 "Meningkatnya Koperasi Berkualitas Dan UM Mandiri", untuk mendukung sasaran ketiga, program yang terdapat pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

- i. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- ii. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- iii. Program Pengembangan UMKM
- iv. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program-program diatas kemudian dikompilasikan dengan hasil analisa kebutuhan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya sehingga perumusan rencana program dan kegiatan DISKOPINDAG tahun 2024 sebagaimana terlampir sesuai dengan hasil entry rumusan Rencana Program dan Kegiatan DISKOPINDAG 2024 pada sistem aplikasi <https://sipd.kemendagri.go.id/>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2																	
2	17																
2	17	03															
2	17	03	2.01														
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi Yang Melaporkan Pelaksanaan RAT Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Monev Koperasi	Persentase koperasi aktif bersertifikat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,52 %	75 koperasi 10 koperasi 20 koperasi	53,02 %	72,710,984	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	82,31 %	210,000,000
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi Yang Akan dibubarkan Jumlah Koperasi Yang Dibina Jumlah Monev Kepada Koperasi cabang yang wilayah kerjanya di kabupaten Sampang	Persentase koperasi aktif bersertifikat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,52 %	110 koperasi 10 koperasi 1 kegiatan	53,02 %	77,289,043	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	82,31 %	200,000,000
2	17	05															
2	17	05	2.01														
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian Jumlah UM yang mengikuti pelatihan Vocational	Persentase Peningkatan SHU	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,52 %	3 koperasi 100 orang	5,07 %	0		Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	82,31 %	475,000,000
2	17	07															
2	17	07	2.01														
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah Data Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,22 %	1400 UM	1,22 %	49,999,958	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Akses permodalan bagi KUM	97,24 %	125,000,000
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah UM yang difasilitasi perizinannya	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,22 %	180 UM	1,22 %	52,209,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Akses permodalan bagi KUM	97,24 %	100,000,000
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan Jumlah UM yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,22 %	5 koperasi 15 UM	1,22 %	204,933,596	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Akses permodalan bagi KUM	97,24 %	200,000,000
2	17	08															
2	17	08	2.01														

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Kencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Kencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Took Ukur	target				
2	17	08	2.01	01	Facilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase UM yang berlegalitas	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan peningkatan produksi	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,39 %	40 orang 40 orang	1,22 %	325,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase UM yang berlegalitas	0,43 %	370,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN													18,397,868,609	23,398,175,210			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													14,371,538,638	16,238,175,210			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													23,999,827	24,000,000			
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Renja Jumlah Dokumen Renstra	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 1 dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	4,000,000
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	4,000,000
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan-RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	4,000,000
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen DPA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	4,000,000
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan-RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	4,000,000
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen LKPJ Jumlah Dokumen LPPD Jumlah Dokumen SAKIP	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 %	3,999,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	4,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													12,781,175,150	12,781,175,210			
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji Jumlah ASN yang mendapatkan TPP Jumlah Honor Kontrak Daerah Jumlah tim/panitia pelaksana kegiatan SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	144 orang 144 orang 20 orang 18 orang	100 %	12,773,175,210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	12,773,175,210

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	4,000,000
3 30 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	3,999,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	4,000,000
3 30 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							15,120,000						45,000,000
3 30 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 ASN	0.1 %	15,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	45,000,000
3 30 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							260,351,661						280,000,000
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 jenis	100 %	14,976,634	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	15,000,000
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Jumlah Spanduk, Bendera, Umbul-umbul	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 jenis 6 jenis 3 jenis	100 %	45,868,374	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	50,000,000
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ATK yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 jenis	100 %	40,881,908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	50,000,000
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan Jumlah Barang Penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 jenis 6000 lembar	100 %	34,999,745	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	35,000,000
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 jenis	100 %	3,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	5,000,000
3 30 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	750 orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	25,000,000
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Rakor Dalam Daerah Jumlah Rakor Luar Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 OK 20 OK	100 %	99,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	100,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	30	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					155,000,000				1,600,000,000					
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Komputer, Laptop dan Peralatan Kantor lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 unit	100 %	92,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	100,000,000
3	30	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang akan dibangun	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	63,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	1,500,000,000
3	30	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					964,992,000				1,318,000,000					
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Surat yang dikirim	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1250 surat	100 %	2,992,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	3,000,000
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telepon yang dibayarkan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 rekening	100 %	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	1,150,000,000
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Penjaga Gudang Jumlah Penjaga Malam Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 orang 6 orang 8 orang	100 %	162,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	165,000,000
3	30	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					154,920,000				170,000,000					
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas (R2) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas (R3) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas (R4) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan perawatan rutin	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 unit 14 unit 6 unit 5 unit	100 %	90,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	100,000,000
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 jenis	100 %	14,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	20,000,000
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	49,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	50,000,000
3	30	01	2.13	Penataan Organisasi					15,980,000				20,000,000					

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sampang
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 30 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen SKM Jumlah Kegiatan Pameran dan Pawai yang diikuti	Persentase penataan organisasi yang dilakukan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 2 kegiatan	100 %	15,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	100 %	20,000,000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								3,606,325,298					5,420,000,000
3 30 03 2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								1,549,838,885					3,000,000,000
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Pasar tradisional dan polowijo yang akan dipelihara	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 %	8 unit	924.1 Milyar	1,549,838,885	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	36 %	3,000,000,000
3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								2,056,486,413					2,420,000,000
3 30 03 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Pasar Kabupaten yang Dikelola Kebersihannya	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 %	25 pasar	924.1 Milyar	1,549,992,213	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	36 %	1,700,000,000
3 30 03 2.02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Retribusi Pasar, Penagihan Retribusi PasarDaerah, dan Pendataan Retribusi Pasar Daerah	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 %	25 pasar	924.1 Milyar	506,494,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	36 %	720,000,000
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								124,999,788					350,000,000
3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								49,999,836					200,000,000
3 30 04 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Perdagangan Sektor Agribisnis	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	340 Miliar Rp	12 bulan	340 Milyar	49,999,836	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	359 Miliar Rp	200,000,000
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								74,999,952					150,000,000
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	Jumlah Laporan Informasi Harga Bahan Pokok dan Harga Sembilan Bahan Pokok serta Barang Penting Lainnya	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	340 Miliar Rp	12 bulan	924.1 Milyar	74,999,952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	359 Miliar Rp	150,000,000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								95,003,000					350,000,000
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								95,003,000					350,000,000
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran.	Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Peredaran Barang Jasa	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,90 %	13 kec	924.1 Milyar	75,003,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran.	16,00 %	300,000,000
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran.	Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Peredaran Barang Jasa	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,90 %	13 kec	924.1 Milyar	20,000,000			Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran.	16,00 %	50,000,000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								200,001,885					1,040,000,000

Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
3	30	07	2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						200,001,885				1,040,000,000				
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran	Jumlah Pameran Promosi yang diikuti	Nilai ekspor Perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,90 %	1 kali	17 Milyar	100,001,404	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran	16,00 %	420,000,000
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran	Jumlah Fasilitas Operasional Dekranasda	Nilai ekspor Perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,90 %	12 bulan	17 Milyar	100,000,481	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran	16,00 %	620,000,000
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						297,999,716				920,000,000				
3	31	02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						262,024,557				750,000,000				
3	31	02	2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						262,024,557				750,000,000				
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	Jumlah Bimtek standarisasi Jumlah IKM yg mendapat fasilitasi standarisasi produk IKM (sertifikasi HALAL, merk HKI, nutricion fact, SNI,MD, barcode Jumlah mesin desain kemasan yang tersedia Pengembangan Klinik desain pengemasan IKM	Persentase pertumbuhan industri formal	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,97 %	3 kelompok 150 produk 2 unit 1 paket	2,8 %	231,211,313	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	47,37 %	250,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	Jumlah diseminasi dan workshop labelling dan kemasan produk IKM Jumlah pembangunan dan pengembangan Rumah Kemasan	Persentase pertumbuhan industri formal	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,97 %	1 kegiatan 1 paket	2,8 %	30,813,244	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	47,37 %	500,000,000
3	31	03		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA						15,205,626				50,000,000				
3	31	03	2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						15,205,626				50,000,000				
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	Jumlah katalog IKM dan data IKM Jumlah monitoring pengawasan perizinan IKM	Persentase pertumbuhan industri formal	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,97 %	20 buku 36 kali	2,8 %	15,205,626	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	47,37 %	50,000,000
3	31	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						20,769,533				120,000,000				
3	31	04	2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						20,769,533				120,000,000				
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Persentase IKM yang memiliki standarisasi industri	Jumlah sosialisasi peraturan industri	Persentase pertumbuhan industri formal	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,27 %	1 kali	2,8 %	20,769,533	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase IKM yang memiliki standarisasi industri	74,44 %	120,000,000
								TOTAL	19,478,011,046					25,998,175,210				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan berbagai permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakan pada tahun 2022, maka tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Sampang tahun 2022 adalah “Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemantapan Pemulihan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”. Adapun arti tema yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 ini adalah pemulihan ekonomi sosial masyarakat sebagai dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 untuk mencapai tujuan utama pembangunan yaitu Sampang Hebat dan Bermartabat. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang mengampu Urusan Pilihan Bidang Koperasi, Bidang Perdagangan dan Perindustrian. Program-program Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang pada Tahun 2022 mendukung prioritas pembangunan kedua pada RKPD yaitu “Pemantapan pemulihan ekonomi melalui penguatan sektor unggulan dan peningkatan nilai tambah”.

Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang melaksanakan program-program yaitu :

- 1) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
- 2) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
- 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
- 4) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
- 5) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 6) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
- 7) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
- 8) PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- 9) PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
- 10) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
- 11) PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
- 12) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											
2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota										
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi Yang Melaporkan Pelaksanaan RAT Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi dan Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Monev Koperasi	Persentase koperasi aktif bersertifikat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.52 %	75 koperasi 10 koperasi 20 koperasi	53.02 %	72,710,984	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi Yang Akan dibubarkan Jumlah Koperasi Yang Dibina Jumlah Monev Kepada Koperasi cabang yang wilayah kerjanya di kabupaten Sampang	Persentase koperasi aktif bersertifikat	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81.52 %	110 koperasi 10 koperasi 1 kegiatan	53.02 %	77,289,043	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN											
2	17	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian Jumlah UM yang mengikuti pelatihan Vocational	Persentase Peningkatan SHU	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	81,52 %	3 koperasi 100 orang	5.07 %	0	

2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						307,142,694			
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						307,142,694			
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah Data Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,22 %	1400 UM	1.22 %	49,999,958	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah UM yang difasilitasi perijinannya	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,22 %	180 UM	1.22 %	52,209,140	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Akses permodalan bagi KUM	Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan Jumlah UM yang terfasilitasi Akses Pembiayaan Permodalan	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	97,22 %	5 koperasi 15 UM	1.22 %	204,933,596	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						325,000,000			
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						325,000,000			
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase UM yang berlegalitas	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan Jumlah peserta pelatihan peningkatan produksi	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0,39 %	40 orang 40 orang	1.22 %	325,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						18,397,868,609			
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						14,371,538,638			
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23,999,827			

3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Renja Jumlah Dokumen Renstra	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Sampang, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 1 dokumen	100 %	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan-RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen DPA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Perubahan-RKA	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,988	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen LKPJ Jumlah Dokumen LPPD Jumlah Dokumen SAKIP	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100 %	3,999,875	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							12,781,175,150		

3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji Jumlah ASN yang mendapatkan TPP Jumlah Honor Kontrak Daerah Jumlah tim/panitia pelaksana kegiatan SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	144 orang 144 orang 20 orang 18 orang	100 %	12,773,175,210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen	100 %	3,999,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Lapr. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 dokumen	100 %	3,999,970	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								15,120,000	
3	30	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rasio pegawai yang mengikuti bimtek dan jumlah ASN OPD	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 ASN	0.1 %	15,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								260,351,661	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 jenis	100 %	14,976,634	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Jumlah Spanduk, Bendera, Umbul-umbul	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	26 jenis 6 jenis 3 jenis	100 %	45,868,374	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah ATK yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 jenis	100 %	40,881,908	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan Jumlah Barang Penggandaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 jenis 6000 lembar	100 %	34,999,745	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 jenis	100 %	3,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Mamin Rapat	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	750 orang	100 %	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Rakor Dalam Daerah Jumlah Rakor Luar Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 OK 20 OK	100 %	99,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							155,000,000		
3	30	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Pengadaan Komputer, Laptop dan Peralatan Kantor lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 unit	100 %	92,000,000	Pendapatan Transfer Antar Daerah
3	30	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor/bangunan lainnya yang akan dibangun	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 unit	100 %	63,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							964,992,000		
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Surat yang dikirim	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1250 surat	100 %	2,992,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telepon yang dibayarkan	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	40 rekening	100 %	800,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Penjaga Gudang Jumlah Penjaga Malam Kantor Jumlah Petugas Kebersihan Kantor	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 orang 6 orang 8 orang	100 %	162,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							154,920,000		

3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas (R2) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas (R3) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas (R4) yang memperoleh Jasa Perpanjangan STNK Jumlah Kendaraan Dinas yang dilakukan perawatan rutin	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	48 unit 14 unit 6 unit 5 unit	100 %	90,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 jenis	100 %	14,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 unit	100 %	49,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	01	2.13		Penataan Organisasi							15,980,000		
3	30	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen SKM Jumlah Kegiatan Pameran dan Pawai yang diikuti	Persentase penataan organisasi yang dilakukan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 dokumen 2 kegiatan	100 %	15,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							3,606,325,298		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							1,549,838,885		

3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Pasar tradisional dan polowijo yang akan dipelihara	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 %	8 unit	924.1 Milyar	1,549,838,885	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya							2,056,486,413		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Pasar Kabupaten yang Dikelola Kebersihannya	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 %	25 pasar	924.1 Milyar	1,549,992,213	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar kabupaten yang bersih dan sehat.	Jumlah Retribusi Pasar, Penagihan Retribusi Pasar Daerah, dan Pendataan Retribusi Pasar Daerah	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	32 %	25 pasar	924.1 Milyar	506,494,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							124,999,788		
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota							49,999,836		
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Perdagangan Sektor Agribisnis	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	340 Miliar Rp	12 bulan	340 Milyar	49,999,836	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota							74,999,952		
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Volume usaha perdagangan sektor agribisnis	Jumlah Laporan Informasi Harga Bahan Pokok dan Harga Sembilan Bahan Pokok serta Barang Penting Lainnya	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	340 Miliar Rp	12 bulan	924.1 Milyar	74,999,952	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							95,003,000		

3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan							95,003,000		
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran.	Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Peredaran Barang Jasa	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,90 %	13 kec	924.1 Milyar	75,003,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran.	Jumlah Pengawasan UTTP, BDKT dan Peredaran Barang Jasa	Volume usaha perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,90 %	13 kec	924.1 Milyar	20,000,000	
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							200,001,885		
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							200,001,885		
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran	Jumlah Pameran Promosi yang diikuti	Nilai ekspor Perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,90 %	1 kali	17 Milyar	100,001,404	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan jumlah pelaku usaha perdagangan besar dan eceran	Jumlah Fasilitasi Operasional Dekranasda	Nilai ekspor Perdagangan	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,90 %	12 bulan	17 Milyar	100,000,481	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							297,999,716		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							262,024,557		
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							262,024,557		

3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	Jumlah Bimtek standarisasi Jumlah IKM yg mendapat fasilitas standarisasi produk IKM (sertifikasi HALAL, merk HKI, nutricion fact, SNI,MD, barcode Jumlah mesin desain kemasan yang tersedia Pengembangan Klinik desain pengemasan IKM	Persentase pertumbuhan industri formal	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,97 %	3 kelompok 150 produk 2 unit 1 paket	2.8 %	231,211,313	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	Jumlah diseminasi dan workshop labelling dan kemasan produk IKM Jumlah pembangunan dan pengembangan Rumah Kemasan	Persentase pertumbuhan industri formal	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,97 %	1 kegiatan 1 paket	2.8 %	30,813,244	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA							15,205,626		
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota							15,205,626		
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	Jumlah katalog IKM dan data IKM Jumlah monitoring pengawasan perizinan IKM	Persentase pertumbuhan industri formal	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	39,97 %	20 buku 36 kali	2.8 %	15,205,626	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							20,769,533		
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota							20,769,533		
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Persentase IKM yang memiliki standarisasi industri	Jumlah sosialisasi peraturan industri	Persentase pertumbuhan industri formal	Kab. Sampang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	63,27 %	1 kali	2.8 %	20,769,533	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL												19,478,011,046		

BAB V

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang disusun sejalan dengan Tema RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2022 yaitu **“Penguatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dalam mendukung Pemanjangan Pemulihan Ekonomi menuju Sampang Hebat Bermartabat”**, dan penjabaran dari tujuan yang tertuang dalam Renstra yaitu **“Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif”**.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut

Menyusun Renja SKPD membutuhkan pemahaman yang memadai terkait dengan peran organisasi atau unit kerja, substansi kebutuhan pelayanan yang akan dilaksanakan dan metodologi perencanaan mulai dari pengumpulan informasi, analisis data hingga formulasi program atau kegiatan. RenjaSKPD disusun sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari kerangka kebijakan pembangunan dan sistem perencanaan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip ini sebagai arahan, kaidah dan landasan nilai yang perlu diikuti oleh SKPD dan pemangku kepentingan lain dalam menyusun sebuah Renja SKPD juga sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai lembaga dalam menyelesaikan berbagai masalah pelayanan yang dihadapi pemerintah daerah.

Renja SKPD tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang melandasi kerangka kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang menentukan arah kebijakan dan program yang akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah termasuk Renja SKPD. Secara programatik Renja SKPD berisi serangkaian prioritas program atau aktivitas pelayanan yang bersifat sektoral yang tidak hanya bersifat substantif saja tetapi mengandung nilai-nilai, komitmen, dan harapan pemerintah daerah khususnya SKPD untuk menjabarkan rencana kerja melalui tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip Renja SKPD tentunya dibangun atas dasar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik yang bersifat sektoral. Prinsip-prinsip penyusunan Renja SKPD hendaknya menjadi dasar dalam praktek pengembangan program SKPD dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis perencanaan, aspiratif dan partisipasi masyarakat. Nilai-nilai yang dibangun dalam proses penyusunan Renja SKPD bukan saja menjadi bagian teknokratis saja tetapi membutuhkan pertimbangan para pemangku kepentingan yang menjadi sasaran

pelayanan. Dalam penyusunan rencana kerjanya dengan memenuhi prinsip/ kaidah - kaidah seperti :

Demokratis dan Partisipatif. Strategis, politis dan Perencanaan dari bawah (Bottom-up planning).

Rencana tindak lanjut penerapan alur dan proses dalam penyusunan dokumen Renja SKPD dituangkan dalam dokumen yang memuat kaidah dan tahapan yang mengacu pada tahapan-tahapan dalam penyusunan renja dengan mengakomodir seperti:

1. Memastikan sinergi dan konsistensi antara program SKPD dengan perencanaan di atasnya seperti RKPD, RPJMD, RPJM Provinsi dan RPJM Nasional.
2. Membangun komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran.
3. Memastikan konsistensi antara program SKPD dengan RPJM Nasional/Renstra KL; RTRW, serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Memastikan konsistensi penjabaran logis Renja SKPD tahunan dengan perkembangan dan kapasitas masyarakat.

**KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SAMPANG**



Drs. Hj. Suhartini Kaptiati

NIP. 19641005 199210 2 001